

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul ini.**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Alat Uji Analisis	Hasil penelitian
1.	Jayanti dan Anwar (2016)	Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)	Regresi Linier Berganda .	Inflasi dan BI Rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM pada tahun 2010-2015 menunjukkan bahwa tidak bisa berpengaruh bersama-sama.
2.	Citra (2013)	Pengaruh NPF, DPK, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia.	Regresi Linier Berganda .	Secara parsial variabel independen NPF, DPK, dan Inflasi berpengaruh pada pembiayaan UKM. Secara simultan DPK, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM.

3. Pratiwi dan Sudirman (2014)	Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja UMKM di Bali Periode 2002-2013	Analisis Linier Berganda	Secara parsial menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja UMKM di Bali periode 2002-2013. PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja UMKM di Bali periode 2002-2013. Ketidakpastian makroekonomi dan krisis global secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja UMKM di Bali periode 2002-2013.
4. Kusnandar (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit UMKM Oleh Perbankan di Indonesia	Analisis Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan rasio keuangan perbankan mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Sementara variabel makroekonomi yang stabil juga menjadi faktor yang mendorong pemberian kredit.

---

**Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah).	Hanya terdapat dua variabel independen.
2	Pengaruh NPF, DPK, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia.	Objek yang digunakan pada BPRS di Indonesia.
3	Variaber-variabel yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja UMKM di Bali Periode 2002-2013.	Hanya terdapat uji normalitas dan uji multikolineritas.
4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit UMKM Oleh Perbankan di Indonesia.	Terdapat variabel rasio keuangan bank (CAR, NPL, DPK, BOPO), Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal; usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank syariah berarti juga bank yang tata cara pengoperasiannya berdasarkan tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Muhammad, 2004: 20).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dengan cara menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bedanya dengan bank konvensional adalah tidak mengenal sistem bunga sedangkan bagi bank syariah sistem bunga adalah riba (Muhammad dan Lukman, 2008: 75). Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya, larangan riba terdapat dalam Al-Qur'an.

#### a. Riba dalam Al-Qur'an

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

(QS. Ar-Rum 30:39)

## 2. Inflasi

Inflasi merupakan variable penting yang menjadi patokan bagi sesuatu perekonomian. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga barang umum secara kontinyu (Nopirin, 1998:25). Sementara itu menurut Tandelilin (2001:212) inflasi merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga produk secara menyeluruh. Sejalan dengan dua pengertian sebelumnya Sekirno (1999:15) menjelaskan inflasi merupakan proses naiknya suatu harga yang berlaku dalam perekonomian. Dari beberapa pengertian diatas, dapat dimengerti bahwa inflasi terjadi apabila harga-harga barang umum mengalami kenaikan melebihi harga normal, dan proses tersebut terjadi secara berulang.

### a. Alat Ukur Inflasi

Menurut Nopirin (1998:25) ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi diantaranya:

#### 1) *Consumer Price Index/CPI*

Indeks ini mengukur pengeluaran rumah tangga, yang sifatnya untuk kebutuhan sehari-hari:

$$\text{CPI} = \text{CPI tahun hitung} - \text{CPI tahun dasar}$$

CPI tahun dasar.

#### 2) *Wholesale Price Index*

Indeks ini lebih kepada perdagangan berskala besar seperti harga bahan mentah untuk produksi.

3) *GNP Deflator*

Indeks ini mencakup total barang dan jasa yang menjadi bagian hitungan GNP.  $GNP\ Deflator = (GNP\ Nominal : GNP\ Riil) \times 100$  persen

**b. Jenis-jenis Inflasi**

Inflasi terbagi kedalam beberapa jenis, Nopirin (1998:27) membagi inflasi menurut sifatnya yaitu:

1) *Creeping Inflation*

Yakni laju dengan pertumbuhan dibawah 10 persen selama satu tahun.

Pertumbuhannya relative lambat dan berlangsung lama.

2) *Galloping Inflation*

Yakni laju inflasi dengan pertumbuhan relative cepat, dengan skala mingguan atau bulanan.

3) *Hyper Inflation*

Yakni laju inflasi dengan pertumbuhan yang paling cepat, hingga dapat terjadi 5-6 kali nflasi dalam waktu yang sangat dekat.

**3. BI Rate**

Menurut Bank Indonesia *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

*BI Rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. *BI Rate* digunakan sebagai acuan operasi

moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar *BI Rate*. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan mempengaruhi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga pinjaman dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang.

*BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasinonal kebijakan moneter. Tujuam akhir dari kebijakan adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk itu Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi menetapkan suku bunga kebijakan *BI Rate* sebagai intrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan pencapaian inflasi yang normal.

Kenaikan *BI Rate* diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga deposito konvensional yang mendorong peningkatan jumlah simpanan deposito pada bank konvensional. Dan dampak dari bank tersebut akan menurunkan jumlah simpanan depositomudharabah pada bank syariah. Dengan penurunan jumlah simpanan deposito akan berdampak pada penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada para pengusaha. Penurunan jumlah pembiayaan juga akan mengakibatkan penurunana pendapat bank dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap margin bagi hasil bank syariah.

#### **4. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat**

Nilai tukat rupiah atau *kurs (foreign exchange rate)* adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Konteks nilai tukar menjelaskan dua mata uang,

yang keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap kedua mata uang tersebut.

Nilai mata uang merupakan perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda. Nilai tukar didasari oleh dua konsep, konsep yang pertama adalah nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) yaitu nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya, jika anda menukar mata uang Dollar dengan mata uang Yen (Jepang), ketika anda memberikan 1 Dollar pada petugas bank maka ia akan memberikan 80 Yen Jepang. Dan jika anda memberikan 80 Yen Jepang kepada petugas bank maka ia akan memberikan anda 1 Dollar.

Jika nilai tukar nominal berubah dari 1 Dollar dapat membeli mata uang asing lebih banyak hal ini disebut apresiasi nilai Dollar. Sedangkan, jika nilai 1 Dollar hanya dapat membeli sedikit mata uang asing maka disebut depresiasi nilai Dollar. Sebagai contoh, apabila nilai tukar meningkat dari 80 Yen Jepang menjadi 90 Yen per Dollar, maka Dollar mengalami apresiasi dan Yen mengalami depresiasi. Ketika nilai tukar dari 80 Yen menjadi 70 Yen per Dollar maka Dollar mengalami depresiasi dan Yen mengalami apresiasi.

Depresiasi atau melemahnya nilai rupiah terhadap Dollar dapat menyebabkan *capital out flow* atau pelarian modal masyarakat keluar negeri karena jika dibandingkan dengan mata uang negara lain maka ekspektasi return investasi di Indonesia lebih rendah. Berdasarkan hal, perubahan rupiah terhadap Dollar akan mempengaruhi jumlah rekening maupun dana pihak ketiga di bank syariah.

Permintaan Dollar Amerika di Indonesia akan semakin menekan rupiah sehingga rupiah terdepresiasi semakin dalam. Penduduk dalam negara juga mulai kehilangan kepercayaan terhadap suatu lembaga keuangan sehingga mengakibatkan pelarian modal



dalam negara menukarkannya menjadi Dollar. Kurs riil di antara kedua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga kedua negara. Jika kurs riil adalah tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah, maka barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs riil adalah rendah, barang dari luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah.

## **5. Penyaluran Pembiayaan dan Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM)**

Menurut Kent Suyono (2003), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penterahan barang-barang sekarang. Joson Djinarto (2000) menyatakan bahwa kredit adalah kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan member janji untuk membayar pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang. Dalam arti ekonomi kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang, uang atau jasa (Suyatno, 2003). Sementara menurut Undang-Undang No. 7 tentang perbankan, kredit merupakan penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara menulasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

### **a. Kriteria Penilaian Pembelian Pembiayaan**

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta penilaian tetap sama. Begitu pula dalam ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan menjadi standar penilaian bank. Biasanya kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5c. Penilaian dengan analisis 5 c adalah sebagai berikut:

1) *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas solvabilitas.

4) *Condition*

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek usaha yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

5) *Colleteral*

*Colleteral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

## **b. Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Prosedur pemberian dan penilaian dunia pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda yang menjadi berbeda hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. (Kasmir, 2009:114)

### 1) Pengajuan Berkas

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan mengumpulkan data penunjang untuk usulan pembiayaan kepada pihak bank. Data tersebut adalah formulir permohonan pembiayaan.

### 2) Penyidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang ditunjukkan sudah lengkap sesuai sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

### 3) Wawancara Awal

Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catata yang ada pada permohonan dan saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

### 4) *On The Spot*

Kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil

wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5) Wawancara II

Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6) Keputusan Pembiayaan atau Kredit

Keputusan pembiayaan atau kredit dalam hal ini adalah apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula dengan pembiayaan yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alesannya masing-masing.

7) Penandatanganan Akad Pembiayaan atau Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan.

8) Realisasi Pembiayaan atau Kredit

Merupakan transaksi dengan menggunakan pembiayaan atau kredit yang telah disetujui oleh bank. Fasilitas diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9) Penyaluran atau Penarikan Dana

Merupakan pencairan atau pengabilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan atau kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

#### c. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

Sesuai dengan yang dimuat dalam pasal 2, keputusan presiden (Kepres) No 163/2000, menteri-menteri Negara (meneg) adalah asiaten-asisten Presiden yang tidak memimpin departemen-departemen, yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Mereka punya tugas untuk membantu Presiden dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan sebagai coordinator dalam bidang tertentu dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan Negara.

Dari menteri-menteri ini ada 5 menteri yang mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan Koperasi dan UKM, baik yang ditetapkan secara spesifik melalui suatu mandat atau lewat kebijaksanaan-kebjaksanaan ekonomi mereka. Kelima menteri tersebut adalah: Menekop & UKM, Depperindag, Menkue, Menko, dan BAPPENAS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Menekop & UKM telah merumuskan perencanaan strategi tahun 2000 untuk pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia, dan semua menteri-menteri dan perwakilan-perwakilan pemerintah lainnya harus mendesain program-program mereka dan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka sendiri yang langsung maupun tidak langsung menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bagi koperasi dan UKM disektor-sektor mereka masing-masing.

Departemen perdagangan lebih menitikberatkan pada aspek permodalan, bahwa suatu usaha disebut usaha kecil apabila permodalannya kurang dari Rp 25 juta. Departemen

perindustrian mendefinisikan industri kecil sebagai sektor usaha yang mempunyai asset tidak lebih dari Rp 600 juta.

Dalam undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No.20 tahun 2008. Menurut UU No.20 Tahun 2008 pasal I disebutkan bahwa:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana undang-undang dimaksud.
- 3) Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, disukai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

a. Kriteria Usaha Mikro dan Menengah

Menurut UU No.20 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. .2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah perkerjanya, yaitu:

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
- b. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
- c. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang.
- d. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Jadi bisa dikatakan pengertian atau usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dimana berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pengembangan perekonomian nasional disebabkan oleh: (Glen Glenerdi, 2002: 290)

- 1) Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sector usaha dan wilayahnya) sektor mikro yang sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 4) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebut adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat.



6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

Di Indonesia peranan UMKM sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebijakan perkembangan UMKM di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti-kemiskinan atau kebijakan redistribusi pendapatan. (Tulus TH Tambunan 2002: 19).

Dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak disemua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya diwilayah pedesaan dan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari betapa pentingnya UMKM. Selain itu, selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai salah satu motor penggerak bagi perkembangan ekonomi dan komunitas lokal.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, UMKM memiliki peranan baru yang lebih penting yaitu sebagai salah satu faktor utama pendorong dan pertumbuhan ekspor non-migas sebagai industri pendukung yang membuat komponen-komponan dan *spare parts* untuk produksi.

UMKM juga berperan penting dalam pertumbuhan ekspor dan bisa bersaing di pasar domestik terhadap barang barang impor maupun di pasar global. Di Indonesia, UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu pemain penting dalam penciptaan pasar baru bagi Indonesia tidak hanya dalam negeri tetapi sampai luar negeri, jadi sebagai salah

satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan dan jasa. UMKM Indonesia harus membenahi diri sejak dini untuk dapat meningkatkan daya saing globalnya.

c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah. Ada beberapa masalah yang dihadapi pelaku UMKM khususnya usaha mikro di daerah pedesaan yang tingkat produktifitasnya (*total factor productivity*) atau efisiensinya rendah, dan mengalami keterbatasan dana dan sumber daya manusia, khususnya dalam manajemen, teknis produksi dan pemasaran, dan tidak memiliki teknologi modern, akan mengalami kesulitan besar, dalam menghadapi persaingan di pasar dunia (Tulus T.H, 2002;43).

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun didasari pula bahwa pengembangan usaha kecil meghadapi beberapa kendala seperti tingkat, kemampuan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Jika dapat dirumuskan bahwa terdapat beberapa permasalahan bagi para pelaku UMKM baik yang beralokasi di pedesaan atupun di perkotaan, yakni:

1) Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran umum yang dialami UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan.

2) Kesulitan Pengadaan Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UMKM di Indonesia.

### 3) Kekuranga Modal

UMKM di Indonesia mengalami masalah utama yaitu keterbatasan modal kerja. Kebanyakan modal awal para pelaku usaha bersumber dari modal (tabungan) sendiri, sehingga permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi.

Kekurangan informasi mengenai prosedur peminjaman, bahkan suku bunga pinjaman yang tinggi membuat para pelaku usaha lebih memilih menggunakan modal sendiri.

### 4) Kesulitan Membayar Pekerja

Penghasilan dalam menjalankan usaha menjadi salah satu bagian dari kelangsungan suatu usaha. Jika barang produksi tidak laku dipasaran maka akan mengakibatkan turunnya omset penjualan sehingga dalam memenuhi kewajiban pelaku usaha untuk membayar karyawannya terhambat. Ditambah lagi ketika UMR naik namun penghasilan dari usaha tersebut tidak mengalami peningkatan maka akan membuat usaha tersebut terancam gulung tikar.

## C. Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama satu periode waktu tertentu (Adiwarman, 2010: 135).

Inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga terjadi penurunan dalam memproduksi barang pada perusahaan. Dampak lain dari inflasi yaitu penurunan nilai mata uang.

Inflasi umumnya memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian. Sebagai akibat dari adanya inflasi, masyarakat mengalami kenaikan karena harga barang dan jasa terus meningkat. Implikasinya masyarakat yang mempunyai dana lebih akan memborong barang dan jasa. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang kekurangan dana dapat membeli barang maupun jasa. Akibatnya negara akan rentan terhadap segala kekacauan yang ditimbulkan.

Pengaruh adanya inflasi terhadap pembiayaan UMKM adalah apabila inflasi semakin tinggi maka akan menyebabkan menurunnya penyaluran pembiayaan UMKM.

**Hipotesis 1:** Inflasi berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

### 2. Pengaruh *BI Rate* terhadap Pembiayaan UMKM

*BI Rate* adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia mengenai suku bunga, yang diumumkan kepada publik yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter. *BI Rate* diumumkan setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesiadan, nantinya kebijakan ini diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui likuiditas (*liquidity management*) di

pasar uang yang mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUABO/N). Menurut Oktavia (2010: 10) dalam Listiono (2015) pergerakan si suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang ditetapkan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Dengan demikikian *BI rate* berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter, dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter Indonesia ditanyakan dalam kenaikan, penurunan atau tetapnya *BI rate* (Fajar, 2014: 24).

**Hipotesis 2:** *BI Rate* berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

### **3. Pengaruh Nilai Tukar Valuta Asing terhadap Pembiayaan UMKM**

Perubahan nilai mata uang rupiah yang fluktuatif berpengaruh terhadap kelancaran usaha. Sebab apabila nilai tukar semakin melemah dibanding nilai tukar mata uang asing, maka biaya produksi semakin meningkat, apabila produsen menggunakan bahan baku dari impor. Selain itu juga berpengaruh terhadap biaya ekspor. Dengan demikian, nilai tukar berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

**Hipotesis 3:** Nilai Tukar Valuta Asing berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

## **D. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu inflasi (X1), *BI Rate* (X2), nilai tukar valuta asing (X3) terhadap pembiayaan UMKM (Y).

